

**LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2017	PENJELASAN & METODE PENGUKURAN (Diisi oleh masing-masing PPL Unit Kerja)	CAPAIAN KINERJA B06	HASIL EVALUASI
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Indeks reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	A (80)		Terlaksananya Kegiatan Upload data dukung PMPRB ke Website RB Kominfo pada tanggal 19-20 Juni 2017. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data dukung PMPRB di Website RB Kominfo. <i>- Kondisi Existing</i>	-Hasil evaluasi RB terakhir menunjukkan salah satu poin utama yang menjadi masalah adalah pada area Manajemen Perubahan (MP). Belum terdapat aksi nyata dari <i>Agent Of Change</i> (Aoc) yang telah dibentuk dalam SK. Selain itu dari sisi akuntabilitas, belum ada mekanisme pengukuran kinerja yang in-line dari Renstra dan PK hingga ke penilaian kinerja individu. <i>- Evaluasi didasarkan pada penilaian Menpan tentang evaluasi RB (Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil)</i> <i>- Masalah, Kendala dan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menpan RB</i>
		Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika	A (80)	Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh Kemenpan dan RB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%). Nilai akhir penjumlahan komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai: AA (>85-100) adalah memuaskan A (>75-85) adalah sangat baik B (>65-75) adalah baik CC (>50-65) adalah Cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang	Penyusunan PK Eselon III dan IV seluruh satuan kerja sedang dilaksanakan, manual indikator kinerja (metode pengukuran) yang tepat dan jelas juga dalam tahap penyelesaian. Selain itu, sedang dilaksanakan <i>rebuilding</i> aplikasi elektronik untuk movev kinerja Kementerian. <i>- Capaian Penilaian Sementara Itjen</i>	Indikator kinerja yang telah ditetapkan sulit diukur, cascading dari PK Menteri ke bawah tidak diturunkan berjenjang, sehingga terdapat PK di tingkat kementerian yang tidak memiliki channeling ke eselon I-nya. Hal ini akan menyulitkan evaluasi pelaporan kinerja. Terdapat PK yang berubah baik atas faktor arahan Pimpinan maupun faktor eksternal yang terjadi pada tahun berjalan tetapi tidak disampaikan melalui mekanisme formal ke Biro Perencanaan. Pemantauan kinerja tidak menggunakan aplikasi elektronik, sehingga rentan dengan kesalahan dan perubahan yang tidak dapat ditelusuri. Aplikasi e-monev baru, masih dalam tahap pembangunan dan belum dapat digunakan.
		Persentase (%) pembentukan Unit Program Management Office (PMO) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	80%		<i>Capaian belum diisi</i>	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa saja kendala pembentukan unit PMO? - Feasibility pencapaian target hingga akhir des 2017?
DITJEN SDPPI						
1	Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia	Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	50%	Target 50% dari 350MHz	- Seleksi belum dapat dilaksanakan karena RPM Tata cara seleksi dan RKM Tim Seleksi masih menunggu penetapan oleh Menkominfo. - Draft dokumen seleksi telah disusun. - RPM Netral Teknologi telah diundangkan dalam PM Nomor 12 Tahun 2017	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa saja kendala dalam penetapan RPM? - Jika RPM disahkan, apakah target persentase ketersediaan dapat terpenuhi?
		Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	93%	-Mengakumulasi data-data dari UPT	Hasil prosentase penanganan aduan/klaime gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio bulan Juni 2017 sebesar 95,77% terdiri dari 71 Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, 68 Penanganan Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang sudah terselesaikan dan 3 dalam Proses	Sampai dengan B06 unit penanganan aduan masih dapat maintaining tingkat persentase penanganan di atas target yang ditentukan

**LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2017	PENJELASAN & METODE PENGUKURAN (Diisi oleh masing-masing PPL Unit Kerja)	CAPAIAN KINERJA B06	HASIL EVALUASI
		Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	93%		<p>1. Hasil Kegiatan Monitoring Online pada bulan Juni 2017 terhadap perangkat Handy Talkie terdiri dari 20 Merk dari 9 Toko Online dan 123 Perangkat Termonitor dengan Perangkat bersertifikat sebanyak 38 perangkat dan Perangkat Tidak Bersertifikat sebanyak 85 perangkat</p> <p>2. Hasil Kegiatan Monitoring Lapangan pada bulan Juni 2017 yaitu dilaksanakan di Jayapura dengan hasil monitoring terdiri dari terdiri dari 8 Toko/User Termonitor dengan jenis perangkat 76 handphone (19 Merk) dan 1 Handy Talkie (1 Merk) dengan Perangkat bersertifikat sebanyak 75 Perangkat Bersertifikat dan tidak ada yang tidak bersertifikat</p> <p>3. Resume Kegiatan Monitoring Penertiban Perangkat untuk bulan Januari - Juni 2017 sebagai berikut :</p> <p>a. Toko Termonitor = 199 Toko b. Perangkat Termonitor = 1770 Perangkat c. Perangkat Bersertifikat = 948 Perangkat d. Perangkat Tidak Bersertifikat = 822 Perangkat e. Tindak lanjut peringatan = 566 Surat Peringatan</p> <p>4. Telah dilaksanakan pada Bulan Juni 2017 Kegiatan Koordinasi untuk Operasi Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Wilayah Jakarta dan Persiapan untuk kegiatan Operasi Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Surabaya pada Bulan Juli 2017</p>	<p>Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam bentuk persentase berapa capaian B06? - penegakan hukum dalam indikator kinerja berupa apa? Penytiaan atau pemusnahan? Atau hanya monitor? - Apa saja kendala penegakan hukum?
2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	82		Rapat-rapat persiapan lelang (penyusunan Dokumen Lelang)	<p>Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat kendala dalam mencapai nilai indeks tersebut?
		Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8,7		Rapat-rapat persiapan lelang (penyusunan Dokumen Lelang)	<p>Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat kendala dalam mencapai nilai indeks tersebut?
DITJEN PPI						
1.	Terwujudnya pengentasan kesenjangan digital dan mempertahankan kedaulatan di wilayah 3T dan Lokpri	Jumlah Kebijakan terkait infrastruktur Penyiaran dan Pita Lebar	7 naskah		<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian BTS (pinjam pakai lahan, tower, dan catu daya) berjumlah 22 kabupaten sedang dalam proses di bagian hukum Setditjen PPI - Telah disusun dan disediakan: Draft Perpres 112, Kajian Akademik, Hasil Probit Audit BPKP, Surat kepada K/L terkait, MoU antara Kominfo dan Kemendagri, Risalah Dokumen diatas telah disampaikan ke Direktur Jenderal PPI sebagai bahan diskusi kepada Menteri Kominfo -Telah disusun matriks perubahan PM Kominfo No. 25 Tahun 2015 Perubahan PM Kominfo No.25 Tahun 2015 dilaksanakan paralel dengan revisi PM Kominfo No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPPTI yang disesuaikan dengan kondisi kedudukan BPPPTI di Kominfo yang saat ini. -Usulan awal terkait perubahan organisasi BPPPTI : a) Nama organisasi semula Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika menjadi Lembaga Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Nasional; b) Lembaga Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; c) Struktur organisasi BPPPTI berubah dan terdiri dari 5 (lima) direktur; d) Terdapat 8 (delapan) wilayah kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. <p><i>Dari 300 Desa yang sudah beroperasi 94</i></p>	<p>Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja kendala dalam penyusunan kebijakan? - Dari 7 naskah, ada berapa naskah yang telah diselesaikan? Sisanya apa saja yang belum dan dengan waktu yang tersisa hingga akhir desember apakah semua target dapat diselesaikan? Apabila tidak, resiko apa yang terjadi?
		Persentase (%) desa di wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri yang memperoleh akses telekomunikasi bergerak seluler (BTS)	5,43%			<p>Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja kendala dalam pembangunan BTS

**LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2017	PENJELASAN & METODE PENGUKURAN (Diisi oleh masing-masing PPL Unit Kerja)	CAPAIAN KINERJA B06	HASIL EVALUASI
		Jumlah akses internet di lokasi layanan publik (antara lain puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Pariwisata, Sentra Produktif) diprioritaskan pada wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri.	800		- Yang sudah beroperasi 104 - Dalam Proses 238 - Proses e-Catalog 266 - Proses Request For Information (RFI) 392	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa saja kendala dalam penyediaan akses internet
		Presentase (%) Infrastruktur Pemancar Lembaga Penyiaran Publik di daerah 3T yang berfungsi dengan baik.	17,8%		- Pembangunan Pemancar LPP TVRI Penyusunan TOR dan RAB untuk penyediaan perangkat (Dalam Proses Pengadaan)	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa saja kendala dalam penyediaan infrastruktur pemancar LPP
		Persentase (%) penyelesaian Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring) antara lain : i. Paket Barat ii. Paket Tengah iii. Paket Timur	80% 30% 10%		Overall Progress Pembangunan: - Paket Barat: 63,89% - Paket Tengah: 14,90% - Paket Timur: 19,88%	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa terdapat kendala dalam pembangunan palapa ring, dan apakah sampai dengan des 2017 target diyakini dapat tercapai?
2	Terwujudnya peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah 3T dan Perbatasan dengan Penguatan Ekosistem	Prosentase (%) desa 3T yang bebas buta internet	4%	4% x 5.520 = 220 Desa	- Melakukan Upgrading desa yang sudah memiliki akses internet dan melakukan pendampingan - Penyediaan Platform tata kelola desa	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala dan masalah dalam pelaksanaan program - feasibility pencapaian target sampai akhir des 2017 - Proses aktivitas yang dilakukan ? - Akses Internet? - Sarana Prasarana?
		Prosentase (%) KPCLPU yang beroperasi dengan baik.	100%		Pencairan dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal Triwulan I tahun 2017 sebesar 78.856.604.219,- dan BA Pencairan Triwulan I untuk 2470 KPCLPU	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala dan masalah dalam pelaksanaan program
3	Terwujudnya Migrasi TV dari Analog ke Digital	Jumlah Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran inisiatif DPR	1 naskah		Telah dilaksanakan 2 kali Rapat Pembahasan pada tanggal 5-6 Juni dan 19-20 Juni dengan hasil sebagai berikut: 1. Melanjutkan pembahasan pada rapat sebelumnya terkait cluster Teknologi di Bidang Penyiaran 2. Adapun konsep digital DPR dengan pemerintah berbeda, disepakati kita tetap mengikuti alur DPR namun secara substansial tetap menggunakan konsep pemerintah. 3. Telah diputuskan bahwa konsep yang digunakan lebih mengarah ke model bisnis Single Mux, dimana LPP RTRI bertindak sebagai penyelenggara multipleksing penyiaran yang dalam menjalankan kewenangannya wajib menyediakan infrastruktur jaringan digital atau mengakuisisi infrastruktur eksisting dari lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP diseluruh wilayah layanan siaran. 4. Perihal Digitalisasi Jasa Penyiaran Radio forum menyepakati tidak perlu diatur dalam RUU ini karena kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap digitalisasi penyiaran radio saat ini tidak mendesak dan masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam pemilihan model bisnis migrasinya. 5. Pembahasan terkait Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang di dalamnya memuat pasal tentang : a. Persyaratan Pendirian, b. Sumber Pendapatan, c. Direksi dan Komisaris, d. Sistem Siaran Jaringan, serta e. Penambahan dan Pengembangan Modal. 6. Terkait ketentuan mengenai jumlah minimal modal dasar pendirian LPS, forum memutuskan agar ketentuan tersebut ditetapkan oleh Menteri, namun merujuk pada UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Undang-undang. Oleh karena itu perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kemenkumham apakah ketentuan mengenai modal minimum dapat ditetapkan oleh Menteri atau tetap harus dalam bentuk Undang-undang. 7. Ditetapkan bahwa WNA dilarang diangkat sebagai komisaris dan direksi. Atasan pelarangan yaitu guna memberdayakan Sumber Daya Manusia dalam negeri serta melakukan proteksi terhadap isi siaran yang berpotensi membentuk opini dan perilaku publik yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 8. Setiap perubahan kepemilikan baik pengendali maupun non pengendali harus dilaporkan kepada pemerintah. LPS wajib melaporkan setiap terjadi perubahan saham kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut terkait perubahan kepemilikan saham akan di atur dalam Peraturan Pemerintah 9. Pembahasan secara intensif, efektif dan efisien diperlukan agar penyusunan draft RUU ini lebih terarah serta sesuai target waktu yang ditetapkan	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala dan masalah dalam penyusunan naskah RUU

**LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2017	PENJELASAN & METODE PENGUKURAN (Diisi oleh masing-masing PPL Unit Kerja)	CAPAIAN KINERJA B06	HASIL EVALUASI
		Prosentase (%) keberhasilan uji Coba siaran TV digital	20 lokasi (12 Wilayah Layanan)		12 lokasi on air diisi oleh LPP TVRI + LPS konten 8 lokasi on air diisi oleh LPP TVRI saja Telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1227 Tahun 2017 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terrestrial pada tanggal 8 Juni 2017 yang mengatur tentang Perpanjangan jadwal uji coba siaran TV Digital Terrestrial.	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - dengan capaian seperti ini apakah artinya target sudah tercapai seluruhnya?
4	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang mendukung keamanan dan ketertiban	Jumlah Naskah kebijakan di bidang registrasi Kartu Prabayar	1 naskah		1) Telah dilakukan Proof of Concept (PoC) akses jaringan dan aplikasi registrasi kartu prabayar terhadap 4 penyelenggara seluler (PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL Axiata dan PT Smartfren bersama dengan Ditjen PPI, KRT BRTI dan Ditjen Dukcapil. Hasil dari PoC: - Pengujian dalam pelaksanaan mekanisme registrasi sesuai PM melalui SMS, melalui web dan melalui gerai serta simulasi call center. - Pengecekan jaringan dan data base registrasi apakah data yang digunakan untuk registrasi benar sesuai dengan data yang diterima di Dukcapil Berdasarkan hasil dari pengujian dimaksud tidak ditemukan kendala dalam melaksanakan registrasi kartu prabayar melalui aplikasi tersebut. 2) Draft Revisi PM 12 Tahun 2016 telah disampaikan ke Menteri (Revisi dilakukan Untuk memperpanjang masa registrasi)	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa saja kendala penyusunan kebijakan registrasi prabayar? - bagaimana feasibility penyelesaiannya hingga akhir des 2017?
5	Terwujudnya Ketaatan Penyelenggara Telekomunikasi dalam pemenuhan Penggunaan Produksi dalam Negeri	Jumlah penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2,1 Ghz yang dilakukan verifikasi terhadap TKDN sesuai amanat regulasi	4		Telah dilaksanakan Opening meeting TKDN ke 4 penyelenggara pita frekuensi 2,1 Ghz untuk verifikasi data awal save assesment dengan hasil untuk memaparkan metode verifikasi.	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - Apa saja kendala pelaksanaan verifikasi? - bagaimana feasibility penyelesaiannya hingga akhir des 2017?
6	Terwujudnya birokrasi Ditjen PPI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima.	IKM (Index Kepuasan Masyarakat)	75			Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - bagaimana feasibility pencapaian target IKM sebesar 75?
		Nilai SAKIP hasil evaluasi Itjen	A		- Rapat pembahasan TOR dan RAB Sekretariat Ditjen PPI tanggal 2-3 Juni 2017 - Rapat pengisian Laporan E-Monev (PMK 249) dan PP No. 39 Tahun 2017 Ditjen PPI tanggal 5-6 Juni 2017 - Rapat Capaian Kinerja berdasarkan PK Es. 1 Ditjen PPI Progres B05 (Mei) tanggal 12-13 Juni 2017	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - masalah dan kendala yang berpotensi menyebabkan nilai SAKIP rendah?
DITJEN APTIKA						
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor sektor strategis pemerintah	Perbaikan Peringkat Indeks ICT Indonesia	Indeks ICT Indonesia <100		Capaian belum diisi	
		Jumlah technopreneur mandiri yang tercipta	200 technopreneur (Penurunan Target dari EY menjadi 65)		- Networking 4 Jakarta - Ignition 4 Surabaya - Networking 4 Surabaya - Workshop 2 Makassar - Ignition 2 Makassar	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apakah dengan melaksanakan tahapan seperti pada capaian tersebut akan serta merta menciptakan 200 technopreneur? - apa saja kendala penciptaan technopreneur
		Jumlah nama domain .id untuk UKM, sekolah, komunitas, dan desa yang diberikan gratis dan dimanfaatkan	40.000 domain.id (Penurunan Target dari EY menjadi 20,000)		Capaian belum diisi	
		Jumlah Sertifikat Digital	100.000 sertifikat digital		1. Rapat pembahasan kemajuan pengembangan Toolkit dan PNS Mail 2. Training instalasi aplikasi penelitian dengan Pemprov DKI 3. Pembahasan RPM Tata Cara Memiliki 4. Pembahasan RPM Penyelenggaraan CA 5. Rapat pembahasan kemajuan pengembangan aplikasi RA 6. Penerbitan SD untuk pejabat struktural di Pemprov Sumatera Barat. 7. Pembahasan Standar Fasilitas dan Perangkat PSrE 8. Pembahasan Implementasi Tanda Tangan Digital di Aplikasi siCANTIK	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi pada pencapaian target 100.000 sertifikat digital? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Jumlah UMKM Go Online	1.000.000 UMKM		pelaksanaan edukasi umkm go online di semarang rapat sinergi program dengan marketplace koordinasi pelaksanaan edukasi umkm go online di palembang, kota bogor, kab.bogor, kota cimahi	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi pada pencapaian target 1juta umkm go online? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?

**LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2017	PENJELASAN & METODE PENGUKURAN (Diisi oleh masing-masing PPL Unit Kerja)	CAPAIAN KINERJA B06	HASIL EVALUASI
		Jumlah Petani dan Nelayan Go Online	300.000 Petani dan Nelayan		- Konsolidasi Database Petani Berbasis Simluhan E-RDKK di 4 lokasi di Jawa Barat - Koordinasi dengan KKP dan Pengembang Aplikasi Nelayan	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian target petani dan nelayan go online? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Jumlah Dokumen Peta ekosistem ekonomi digital	1 dokumen		<i>Capaian belum diisi</i>	
		Jumlah inisiatif roadmap e-Government tahap II yang terlaksana	8 inisiatif		<i>Capaian belum diisi</i>	
		Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika	2 draft peraturan		<i>Capaian belum diisi</i>	
		Layanan Aplikasi Informatika yang terintegrasi	1 layanan		<i>Capaian belum diisi</i>	
2	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika	Tidak terdapatnya temuan negatif yang berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan	Opini WTP		<i>Capaian belum diisi</i>	
DITJEN IKP						
	1 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%		- Survey Persepsi Masyarakat yang mengetahui kebijakan pemerintah - Dashboard untuk memonitor kegiatan K/L dalam penyebaran narasi tunggal	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Persentase (%)Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik	100%		- Masih Menyusun Standar Konten 33 K/L	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	70%		- Telah Menyusun SOP GPR (Masih di Menteri) - Permen Kominfo tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka pelaksanaan inpres nomor 9 tahun 2015	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Persentase (%) Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra;	60% (Dari 7 Kemitraan yang direncanakan pada Tahun 2017) 1. Pemda 2. Line 3. Twiter 4.		B06: -Kanal medsos Jawa Timur, Sulawesi I, Sulawesi II - Pembentukan satgas Medsos Pemda - Penayangan LINE (38 ribu subs) dan Indonesia Update (kaskus) - Kerjasama dengan twitter, percepatan verifikasi - Penyebaran 62 Narasi Tunggal dengan 30% jangkauan atau reach	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Persentase (%) Penyusunan regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik;	80%		B06: • Penyusunan Indikator Indeks Komunikasi Publik • Pembahasan NSPK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo Sub Urusan IKP • Rapat Pembahasan Lanjutan RPM Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas • rapat koordinasi penyusunan pedoman rancangan anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan sub bidang informasi dan komunikasi publik di daerah • pembahasan finalisasi regulasi jabatan fungsional pranata humas • Perumusan Lanjutan RPM Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas • Rapat Pemetaan Fungsi Kerja Perangkat Daerah Bidang Kominfo Sub Urusan IKP	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
	2 Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	Tidak terdapatnya temuan negatif yang berpengaruh terhadap opini atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	100%		- Ada 3 Kebijakan dan 2 NSPK yang sementara diproses. <i>Capaian belum diisi</i>	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi? - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?

**LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2017	PENJELASAN & METODE PENGUKURAN (Diisi oleh masing-masing PPL Unit Kerja)	CAPAIAN KINERJA B06	HASIL EVALUASI
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo	Persentase (%) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo	80%		1. Menyusun Legal Drafting Permen Kominfo tentang MR Penyusunan Manual Book Aplikasi Monitoring MR dan Laporan Final MR 2. Melakukan finalisasi Pedoman MR, Uji Coba Aplikasi MR, dan Penyusunan Laporan Risk Profile	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah yang dihadapi pada penerapan SPIP?
		Persentase (%) menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal	20%		Melaksanakan Konsolidasi dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP di Ditjen SDPP	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dalam menurunkan jumlah temuan yang terjadi?
		Opini atas Laporan Keuangan	WTP		Capaian belum diisi	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala pencapaian WTP? - bagaimana feasibility pencapaian WTP?
		Skor tingkat kapabilitas APIP	3		Capaian belum diisi	
BALITBANG SDM						
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder	30% (dari 20 kajian penelitian)		Penelitian pada seluruh satker telah berjalan. Penelitian Puslitbang SDPPPI dalam tahap Pengumpulan Data Tahap II, Penelitian Puslitbang Aptika IKP dalam tahap pengolahan data, terutama Survey Indikator TIK - 4 Tahap Penilaian Proses Penelitian: 1. Persiapan Teknis Bobot 10% 2. Penyusunan Desain Penelitian 15% 3. Pengumpulan dan Pengolahan data 50% 4. Pelaporan Akhir 25% - Masih dalam proses pengumpulan data,	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala pencapaian WTP? - bagaimana feasibility pencapaian WTP?
2	Meningkatnya peran pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK	70% (Dari 1.120 orang) <i>Perubahan Target 760 Orang</i>		Pelaksanaan bimtek aparatur sebanyak 714 orang dari target 1.120 orang (64%)	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - apa kendala dan masalah dalam mencapai target aparatur tersertifikasi? - Persentase kelulusan berbeda di tiap daerah - bagaimana feasibility pencapaian target tersebut hingga des 2017?
		Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK berbasis SKKNI	70% (Dari 12.000 orang) <i>Perubahan Target menjadi 10.750 Orang</i>		Pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI bagi 6.652 orang dari 12.000 orang (55%), dengan jumlah peserta kompeten 3.505 orang	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala apa saja yg terjadi dalam pelaksanaan SKKNI? - mengapa jumlah yg kompeten +/- hanya separuh dari peserta yg ikut?
		Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S3	90% per angkatan (per angkatan yang lulus tahun 2017) <i>268 Orang</i>		- Koordinasi dengan 7 PTN mitra perguruan tinggi DN - Sosialisasi program beasiswa DN - Pengumuman seleksi beasiswa LN bagi 16 orang <i>133 Penerima Beasiswa merupakan gabungan DN dan LN Rinciannya: Komunikasi 20 Orang, Informatika 98 Orang, dan LN 15 Orang</i>	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala apa saja yg biasanya terjadi dalam pelaksanaan SKKNI? - data jumlah orang yg lolos beasiswa LN dan DN?
		Jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4 dokumen		- RSKKNI Bidang Multimedia telah sampai pada tahap Workshop II - RSKKNI Bidang Telekomunikasi telah sampai pada tahap Workshop I <i>- Regulasi berupa Permen, Kominfo berupa Rancangan SKKNI</i>	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala apa saja yang terjadi penyusunan regulasi SKKNI? - bagaimana feasibility terselesaikannya rancangan regulasi ini?
3	Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah	Jumlah peserta literasi TIK untuk anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas	5400 <i>Perubahan Target Menjadi 5.300</i>		Pelaksanaan pelatihan literasi TIK bagi perempuan/IRT dan anak usia sekolah sebanyak 5.384 orang, dan 150 disabilitas dari target 5.400 orang (102%)	Diperlukan informasi lebih lanjut untuk dapat dievaluasi: - kendala dan masalah dalam mencapai target 5400 orang? - data breakdown target peserta, misal, kategori anak usia sekolah berapa peserta, wanita berapa peserta, disabilitas berapa?

LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REKOMENDASI
(Diisi oleh Biro Perencanaan)

Perlu keterlibatan Pimpinan lebih jauh agar AoC tidak sekedar dokumen, sehingga penilaian dari area MP dapat meningkat signifikan.

Biro Kepegawaian dan Org perlu koordinasi intensif untuk mensinkronisasikan penurunan PK hingga ke penilaian kinerja individu (SKP)

-Terhadap PK yang mengalami perubahan di tahun berjalan harus segera diusulkan secara resmi ke Biro Perencanaan.

-Metode pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja di PK harus disusun segera agar pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

-Kebutuhan pembangunan Aplikasi e-Monev baru terkendala karena PDSI tidak memiliki anggaran yang cukup, tetapi karena hal ini penting, tetap dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Set SDPPI. Karena kebutuhan akan pemantauan yang komprehensif cukup mendesak, maka perlu percepatan penyelesaian pembangunan aplikasi e-monev baru. Diharapkan Biro Perencanaan, PDSI, dan SDPPI dapat koordinasi lebih intensif untuk penyelesaian ini.

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

Untuk bahan evaluasi target pada tahun berikutnya, diperlukan data rata-rata aduan yang masuk dan yang terselesaikan tiap bulan

LEMBAR EVALUASI PERJANJIAN KINERJA
ESELON 1
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REKOMENDASI
(Diisi oleh Biro Perencanaan)

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

Rekomendasi disusun setelah terdapat hasil evaluasi

